

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Ahmad Ghufron dan Sudarsono. 1991. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Arief Budiman. 1996. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta ; Pustaka Belajar.
- Bachsan Mustafa. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan. 1987. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung : Armico.
- Bewa Ragawino. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung : UNPAD.
- Burhannudin A. Tayibnapis. 1995. *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*. Jakarta : PT Anem Kosong Anem.
- Diana Halim Kuntjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- E. Utrecht. 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- H. Azhary. 1993. *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Disertasi*. Universitas Indonesia.
- Hamka. 2014. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi : Makasar.

- Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung : Binacipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Mahfud MD. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Miriam Budiardjo. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Miftah Thohah. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Moh. Kuswardi dan Ibrahim Harmaily. 1978. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI.
- Nata Saputra. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah. Bandarlampung* : Universitas Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1985. *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintah*. Surabaya : Copy-Percetakan & Stensil Djumali.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahmat Hollyson. 2014. *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*. Jakarta : Bestari
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rochmat Soemitro. 1979. *Masalah Peradilan Adminstrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Sastra Djatmika dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- SF. Marbun. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2000. *Pokok-pokok Hukum dan Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung : Alumni.
- Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudibyo Triatmojo. 1983. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400).
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplinan Penindakan Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara B/71/M.SM.00.00/2017

**Internet :**

Fakultas Hukum Unpatti. “*Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah*”. 22 Februari 2018. <http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/63-aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah>

**Wawancara :**

Pelaksana Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan wawancara. 2017. Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas.